



LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)

2023

Dinas PU Bina Marga
Kabupaten Lamongan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2022 pada dasarnya merupakan Rencana Strategi (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) yaitu gambaran dari hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Kebinamargaan. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan.

Harapan kami semoga LKjIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Lamongan, Januari 2023

. KEPALA DINAS PU BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN

SUJARWO, ST., MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 1974093 200112 1 005



DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi.....	4
C. Data Umum Organisasi.....	19
D. Sistematika Penyajian LKjIP	23
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	25
A. Rencana Strategis	25
B. Rencana Kinerja Tahun 2022.....	27
Program Dan Kegiatan	
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	30
A.1 Pencapaian Kinerja	31
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	31
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai akhir Periode RPJMD/RENSTRA	32
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	37
A.5 Alisis Penyebab Keberhasilan yang telah dilakukan	37
A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya.....	39
A.7 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja.....	40
B. Realisasi anggaran	40
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60



LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- Matriks Rencana Strategis (RS)
- Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2022
- Perjanjian Kinerja 2022



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan selama Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, untuk Tahun 2022 ini dapat dikatakan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang sangat baik/sangat berhasil dengan total capaian Indeks Infrastruktur Jalan sebesar 101,78% dan Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan sebesar 94,35%. Sedangkan total capaian indeks Infrastruktur Jembatan sebesar 104,60% serta Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan sebesar 100,00%. Namun, jika dibandingkan



dengan Capaian Kinerja Dinas PU Bina Marga pada tahun 2021 sedikit mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan SK Bupati Lamongan Nomor: 188/368/KEP/413.013/2020, yang didalamnya memuat tentang penambahan total panjang jalan kabupaten yang sebelumnya 416,116 km menjadi 665,475 km. Akan tetapi, secara garis besar jika total panjang jalan tetap sama, maka tidak ada penurunan bahkan cenderung mengalami kenaikan yang positif.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya, sehingga pada tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan adalah masih Kurangnya staf yang menangani pengelola kegiatan yang mendukung dalam kinerja, untuk itu perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor : XI/ MPR/ 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara, wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem AKIP merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi. Sistem AKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pencapaian kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu, setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Dalam dunia birokrasi,



akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan berperan pada bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan yang mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan dan Program, dengan memperhatikan strategi dan prioritas pembangunan di Kabupaten Lamongan. Arah Kebijakan Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun 2016 - 2021 diimplementasikan dalam program prioritas sebagai berikut :

- a. Menjaga kemantapan kondisi jalan untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Meningkatkan klasifikasi dan kualitas jalan untuk mendukung pengembangan wilayah perkotaan dan pedesaan secara adil dan merata.

Terkait dengan pelaksanaan pencapaian kinerja dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan , maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan sebagai prinsip



transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan.

a. Landasan Hukum

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan perangkat daerah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan.

b. Tujuan

Sesuai dengan perkembangan perekonomian dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan yang bernuansa multidimensional, maka diperlukan manajemen pembangunan yang lebih memadai dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kelancaran lalu lintas dalam rangka mendukung kegiatan Perekonomian masyarakat
2. Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas pedesaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan .
3. Meningkatkan kondisi dan fungsi jalan dan jembatan,.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebinamargaan



B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 76 Tahun 2020 merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang sub Bidang Bina Marga. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga.

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi;
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengelolaan Jalan membawahi;
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jalan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan.
4. Bidang Pengelolaan Jembatan membawahi;
 - a. Seksi Pembangunan/Peningkatan Jembatan;
 - b. Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Rutin Jembatan.
5. Bidang Sarana Prasarana Kebinamargaan membawahi:



- a. Seksi Peralatan dan Perlengkapan;
 - b. Seksi Leger, Inpeksi Jalan Dan Jembatan;
 - c. Seksi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi. Jalan dan Jembatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Tugas pokok dan Fungsi

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga memiliki fungsi :

- a. Perencanaan strategis dan teknis bidang pekerjaan umum bina marga;
- b. Pembinaan pelayanan umum bidang pekerjaan umum bina marga;
- c. Pengawasan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dan Standar Pelayanan Minimal urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum bina marga;
- d. Penyelenggaraan kebijakan di bidang pekerjaan umum bina marga;
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum bina marga;
- f. Pembinaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum bina marga;
- g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas.



Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - g. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - h. Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - i. Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - j. Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;



- b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup dinas;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur, dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- i. Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- j. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan penyiapan dan organisasi penatalaksanaan kepegawaian, produk hukum dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas,
 - b. Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai mulai penempatan, formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja , pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, SKP, DUK, Sumpah/ janji ASN, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, disiplin pegawai, menyusun standart kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional, dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi ASN dan lainnya,
 - c. Menyusun kebutuhan dan pengadaan perlengkapan dan bahan habis pakai dinas;
 - d. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi organisasi serta ketatalaksanaan
 - e. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penerimaan, pendistribusian, dan penggandaan naskah – naskah dinas;
 - f. Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan , administrasi, perjalanan dinas dan keprotokolan
 - g. Melaksanakan tatalaksana, tata usaha arsip dan perpustakaan;
 - h. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - i. Menyusun rancangan usulan produk hukum daerah
 - j. Melaksanakan tugas hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik dan
 - k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3. Bidang Pengelolaan Jalan merupakan unsur pelaksanaan Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis pembangunan dan peningkatan jalan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jalan, serta pemeliharaan rutin.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Jalan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jalan;
- b. Perencanaan kebijakan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jalan;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jalan;
- d. Penyelenggaraan review, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jalan; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan dan /atau Peningkatan Jalan;
- b. Mengelola dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau Peningkatan Jalan;



- c. Melaksanakan pemutakhiran program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan dan/atau Peningkatan Jalan;
 - d. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan/atau Peningkatan Jalan;
 - e. Menganalisa dan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan dan/atau Peningkatan Jalan;
 - f. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pembangunan dan/atau Peningkatan Jalan; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Berkala Jalan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jalan;
 - b. Mengelola dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala jalan;
 - c. Melaksanakan pemutakhiran program dan estimasi biaya pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jalan;
 - d. Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jalan;
 - e. Menganalisa dan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jalan;
 - f. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jalan;



g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan;
- b. Menganalisis data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan;
- c. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan secara rutin;
- d. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pemeliharaan rutin jalan;
- e. Menyusun pemutakhiran program pemeliharaan rutin jalan;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jalan;
- g. Melaksanakan kegiatan tanggap darurat apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam jalan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Jembatan merupakan unsur pelaksanaan Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Bidang Pengelolaan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis pembangunan dan peningkatan jembatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jembatan, serta pemeliharaan rutin jembatan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:



- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;
- b. Perencanaan kebijakan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;
- d. Penyelenggaraan review, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala, serta pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 1. Seksi Pembangunan/Peningkatan Jembatan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong;
 - b. Mengelola dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan/atau Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong;
 - c. Melaksanakan pemutakhiran program dan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan dan/atau Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong;
 - d. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan/atau Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong;
 - e. Menganalisa dan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan



pembangunan dan/atau Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong;

- f. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pembangunan dan/atau Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jembatan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jembatan dan Gorong-gorong;
- b. Mengelola dan mengolah data untuk bahan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala jembatan dan gorong-gorong;
- c. Melaksanakan pemutakhiran program dan estimasi biaya pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jembatan dan gorong-gorong;
- d. Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jembatan dan gorong-gorong;
- e. Menganalisa dan menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jembatan dan gorong-gorong ;
- f. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Berkala Jembatan dan gorong-gorong;



- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pemeliharaan Rutin Jembatan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan dan gorong-gorong;
 - b. Menganalisis data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan dan gorong-gorong;
 - c. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan jembatan dan gorong-gorong secara rutin;
 - d. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;
 - e. Menyusun pemutakhiran program pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong;
 - g. Melaksanakan kegiatan tanggap darurat apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam Jembatan;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. **Bidang Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksanaan Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas**

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan



pemberian bimbingan teknis bidang pengelolaan peralatan dan perbekalan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan pembinaan dalam bidang Sarana dan Prasarana jalan;
 - b. Pengawasan kegiatan bidang Sarana dan Prasarana untuk menunjang kegiatan kebinamargaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana bidang kebinamargaan termasuk manajemen pengelolaannya;
 - d. Pengendalian pemanfaatan Sarana dan Prasarana untuk menunjang kegiatan kebinamargaan;
 - e. Penyelenggaraan kegiatan lainnya yang terkait Sarana dan Prasarana bidang kebinamargaan; dan
 - f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1. Seksi Peralatan dan Perlengkapan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana teknis Peralatan dan Perlengkapan kebinamargaan;
 - b. Perencanaan kebijakan program Peralatan dan Perlengkapan;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan peralatan dan perlengkapan;
 - d. Pembinaan monitoring dan evaluasi pengendalian peralatan dan perlengkapan;
 - e. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan peralatan dan perlengkapan;
 - f. Menyusun pemutakhiran program dan estimasi biaya peralatan dan perlengkapan;



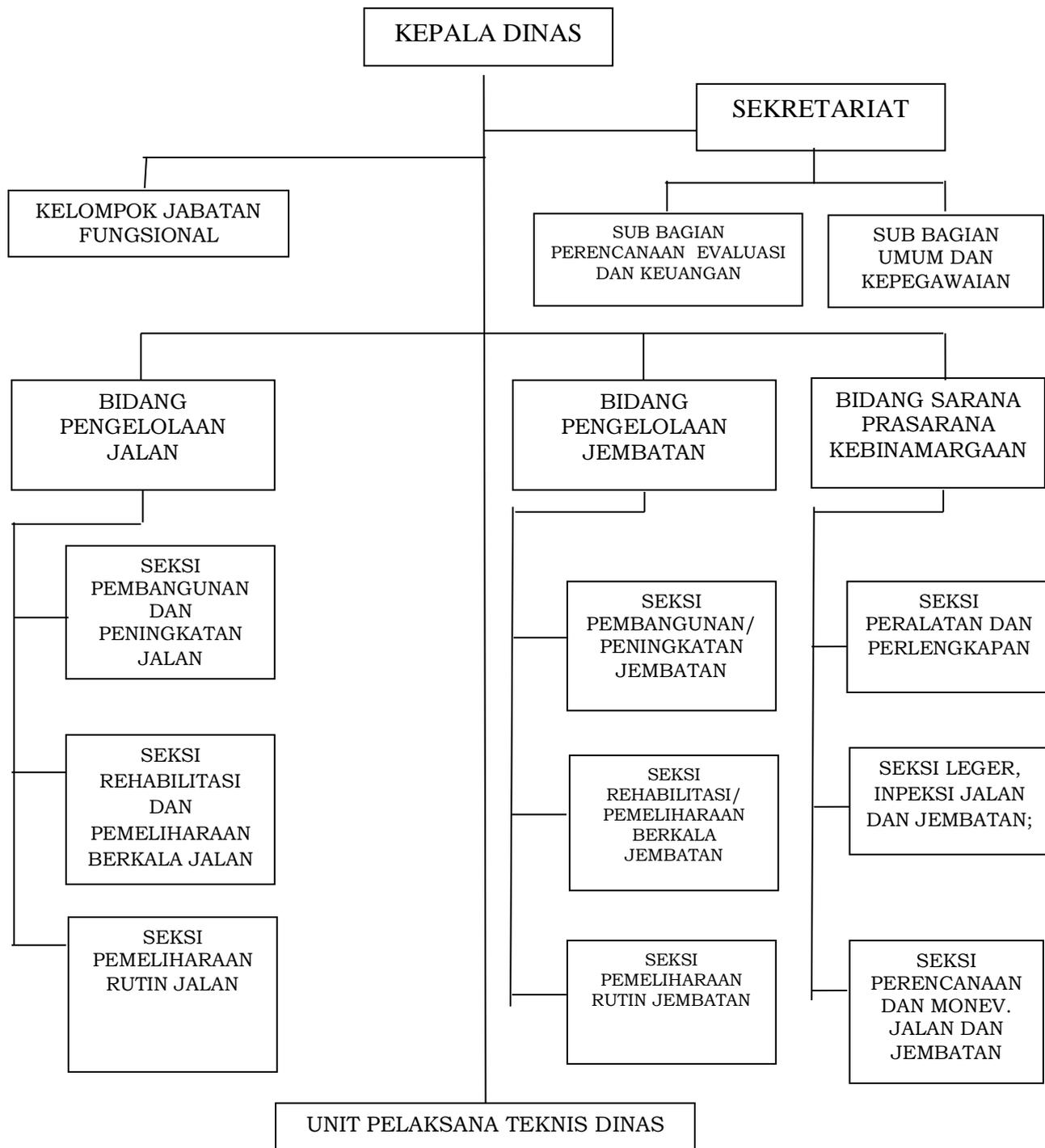
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Peralatan dan Perlengkapan;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seksi Leger, Inspeksi Jalan dan Jembatan
- a. Menyusun rencana teknis kegiatan Leger, Inspeksi Jalan dan Jembatan;
 - b. Melaksanakan analisis data dan informasi dalam rangka Leger, Inspeksi Jalan dan Jembatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan Leger, Inspeksi Jalan dan Jembatan;
 - d. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan Leger, Inspeksi Jalan dan Jembatan;
 - e. Menyusun pemutakhiran program dan estimasi biaya Leger, Inspeksi Jalan dan Jembatan;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Leger, Inspeksi Jalan dan Jembatan;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Perencanaan dan Monitoring dan Evaluasi Jalan dan Jembatan
- a. Menyusun Rencana Teknis kegiatan Perencanaan dan Monev. Jalan / Jembatan ;
 - b. Melaksanakan analisis data dan informasi dalam rangka Perencanaan dan Monev. Jalan / Jembatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan Perencanaan dan Monev. Jalan/ Jembatan ;



- d. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengendalian kegiatan Perencanaan dan Monev. Jalan / Jembatan;
- e. Menyusun pemutakhiran program dan estimasi biaya Perencanaan dan Monev. Jalan / Jembatan;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan;
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci bagan struktur organisasi Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada gambar berikut:





C. Data Umum Organisasi

1. Personil

Sampai dengan akhir bulan Desember 202, jumlah seluruh pegawai di lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan sebanyak **79** orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak **38** orang dan Pegawai Kontrak sebanyak **41** orang. Secara umum data Pegawai di lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan berdasarkan golongan adalah sebagaimana tersebut.

Tabel 1.1 Data Pegawai di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan

No	Status Kepegawaian	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	PNS	7	18	13	-	38
2	Tenaga Kontrak Kerja					41
Jumlah						79

Data Pegawai di lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan berdasarkan Eselon adalah sebagaimana tersebut.

Tabel 1.2 Data Pegawai di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan Berdasarkan Eselon

No	Uraian	Eselon												Staf	Jm I
		IIa	IIb	IIc	IId	IIIa	IIIb	IIIc	IIId	IVa	IVb	IVc	IVd		
1	Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan	1	-	-	-	1	3	-	-	9	-	-	-	24	38
Jumlah		1	-	-	-	1	3	-	-	9	-	-	-	24	38

Sedangkan Data Pegawai di lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana tersebut.



**Tabel 1.3 Data Pegawai di Lingkungan
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	URAIAN	JENJANG PENDIDIKAN								Jm l
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	
1	Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan	-	-	14	-	-	-	16	8	38
Jumlah		-	-	14	-	-	-	16	8	38

2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan dinas, inventarisasi, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

**Tabel 1.4 Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Tanah Bangunan	1	Luas = 1,105 M ²
2	Tanah Sawah	1	Luas = 15,0006 M ²
3	Tanah Jalan	72	Luas = 1,584,376,10
4	Bangunan Laboratorium	1 Unit	Luas = 77 M ²
5	Bangunan Gudang	1 Unit	Luas = 290 M ²
6	Bangunan Kantor	1 Unit	Luas = 413 M ²
7	Gudang Terbuka	2 Unit	Luas = 478 M ²
8	Bangunan Musholla	1 Unit	Luas = 121 M ²
9	Panjang Jalan	665,116 Km	
10	Bangunan Jembatan	256 Bh	
11	Bangunan Gorong-gorong :		
	~ Dalam Kota	20 Bh	



	~ Luar Kota (Bangunan)	137	Bh	
12	Generator	2	Bh	Baik
13	Vibrator Roller	2	Bh	Baik
14	Mobil PICK-UP	7	Bh	6 Baik ; 1 Rusak Ringan
15	Station Wagon	7	Bh	7 Baik
16	Mobil Beban / Truck	9	Unit	9 Baik
17	Sepeda Motor	13	Bh	11 Baik ; 2 Rusak Ringan
18	Walles /Three Whell Roller	9	Bh	9 Baik
19	Mesin Ketik	4	Bh	Rusak Berat
20	Almari Kayu	15	Bh	Rusak Berat
21	Almari Besi	45	Bh	25 Baik ; 12 Rusak Ringan ; 7 Rusak Berat
22	Meja Tulis Kayu	75	Bh	45 Cukup Baik ; 30 Rusak Ringan
23	Meja Komputer	4	Bh	Baik
24	Meja Kerja	38	Bh	Baik
25	Kursi tamu	3	Set	2 Baik ; 1 Kurang baik
26	Kursi Putar	34	Bh	24 Baik, 10 Kurang Baik
27	Kursi Lipat	239	Bh	98 Baik ; 33 Rusak Ringan ; 162 Rusak berat
28	Kipas Angin	1	Bh	Baik
29	Meja Gambar	3	Bh	2 Rusak Berat ; 1 Baik
30	CPU Monitor (original)	5	Bh	Baik
31	PC	32	Unit	7 Baik
32	Note Book	35	Unit	15 Baik, 20 Rusak Berat
33	AC	24	Unit	17 Baik ; 7 Kurang Baik
34	Printer	66	Bh	60 Baik ; 6Rusak Berat
35	Pesawat Telpon	5	Bh	Rusak Berat
36	Mesin Cetak gambar	1	Bh	Baik
37	Panaboard	1	Bh	Baik
38	Almari Katalog	1	Bh	Baik
39	Almari Pesawat TV	1	Bh	Rusak Ringan



40	Kotak Kunci	1	Bh	Baik
41	Filling Gambar	3	Bh	Rusak Berat
42	Rak Arsip	6	Bh	Baik
43	Bufet	4	Bh	Baik
44	Filing Kabinet	40	Bh	30 Baik ; 10 Rusak Ringan
45	Vidio Record	1	Bh	Baik
46	Faximile	1	Bh	Rusak
47	Amplifier	1	Bh	Baik
48	Warles	1	Bh	Baik
49	Pompa Air	1	Bh	Baik
50	Almari Vibrator	3	Bh	Baik
51	Band Kas	5	Bh	Rusak Ringan
52	Jam Dinding	10	Bh	Baik
53	Stafolt	4	Bh	Baik
54	Televisi	4	Bh	2 Baik ; 2 Rusak Berat
55	White Board	5	Bh	2 Baik ; 3 Rusak Ringan
56	Kamera	35	Bh	12 Baik ; 13 Rusak Ringan ; 10 Rusak
57	USB Stabilise	3	Bh	Baik
58	Handy Came	4	Bh	2 Baik, 2 Rusak Ringan
59	Hummer Tes	3	Bh	Baik
60	Core Drill	5	Bh	Baik
61	Mesin Potong Pohon	5	Bh	4 Baik ; 1 Rusak Ringan
62	Roll Meter	4	Bh	Rusak Ringan
63	Handy Talky	3	Bh	Baik
64	Genset	3	Bh	2 Baik ; 1 Rusak Berat
65	Gps	1	Bh	Baik
66	Alat Laboratotium Bahan Bangunan Konstruksi	2	Unit	Baik
67	Meja Rapat	7	Unit	4 Baik ; 3 Rusak Ringan



3. Pembiayaan

Guna mencapai Misi Tujuan dan Sasaran Tahun 2022, dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan yang secara rinci disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5 Anggaran Belanja Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan 2022

NO.	URAIAN		JUMLAH	KET
I.	APBD Kabupaten			
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp.	5.260.130.805,00	
	Belanja Pegawai	Rp.	5.260.130.805,00	
2.	Belanja Langsung	Rp.	213.589.117.600,00	
	a. Belanja Pegawai	Rp.		
	b. Belanja Barang dan jasa	Rp.	807.460.000,00	
	c. Belanja Modal	Rp.	22.358.986.085	
			190.422.671.515,00	
	J U M L A H	Rp.	218.849.248.405,00	

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis, rencana Kinerja serta perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja ta
5. hun ini dengan standart nasional (Jika ada).
6. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
8. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan

1. Visi

Visi adalah gambaran masa depan yang dipilih dan hendak diwujudkan pada suatu saat yang ditentukan, visi juga merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin diciptakan oleh organisasi, sehingga Visi dapat memberikan petunjuk kearah mana kita menuju dan seperti apa keadaan yang akan terwujud dimasa yang akan datang.

Visi Kabupaten Lamongan yakni, “Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan” maka keberadaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan sebagai perangkat Daerah, merupakan komponen utama bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan masyarakat Lamongan yang Dinamis, mandiri, dan responsive terhadap perubahan, serta lebih meningkatkan kesejahteraannya dengan terpenuhinya infrastruktur yang layak dan memadai.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan akan lebih tanggap dalam menyingkapi dinamika perubahan keadaan kearah penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih terarah, terencana, terpadu, efektif dan efisien dan diharapkan dapat menumbuhkan komitmen seluruh komponen unit kerja Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan menuju Pemerintahan yang baik, mampu menjadi akselerator dalam pengelolaan sumber daya dan prestasi kerja (Kinerja) organisasi.



2. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan suatu instansi dan sasaran yang ingin dicapai, membawa suatu organisasi kepada suatu fokus, menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya, sehingga pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai tujuan.

Dalam penjabaran diatas perumusan Misi, Dinas PU Bina Marga Kabupaten lamongan mengemban tugas pada misi yang ke tiga yakni ;
“Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan“

1) Tujuan

Mewujudkan Infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat kabupaten lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan perekonomian serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan bernuansa multidimensional, maka diperlukan manajemen pembangunan infrastruktur dengan meningkatkan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan menetapkan tujuan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Infrstruktur Daerah yang Ramah Lingkungan

2) Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan sesuai dengan misi ke 3, yakni Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata.

Mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Indeks Infrastruktur Jalan
2. Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan



3. Indeks Infrastruktur Jembatan
4. Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan
5. Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga
6. Nilai IKM Dinas PU Bina Marga

B. Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Program dan Kegiatan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/ kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan.

**Table 2.1 Rencana Kerja Tahunan
Dinas Pu Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Indeks Infarstruktur Jalan	80,74 %
		Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	89,01%
		Indeks Infrastruktur Jembatan	76,10 %
		Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan	77,23%
		Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga	85,03%
		Nilai IKM Dinas PU Bina Marga	86%

Rencana kinerja tahun 2022 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2022. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Penetapan Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2022.



1) Program dan Kegiatan:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	7.399.991.405,00
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	276.755.590,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	4.972.760.805,00
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	49.500.000,00
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	329.579.900,00
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	241.411.900,00
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.017.510.000,00
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	512.473.210,00
Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	211.449.257.000,00
1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp	211.449.257.000,00
2. Penyusunan Rencana Kebijakan, dan Strategi Pengembangan jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp	400.000.000,00
3. Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Rp	50.200.000.000,00
4. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp	1.159.086.900,00
5. Pelebaran Jalan menuju Standar	Rp	1.542.397.600,00
6. Rekonstruksi Jalan	Rp	114.220.709.678,00
7. Rehabilitasi Jalan	Rp	2.125.417.969,00
8. Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp	13.235.743.026,00
9. Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp	12.547.245.193,00
10. Penggantian Jembatan	Rp	13.494.705.917,00
11. Rehabilitasi Jembatan	Rp	1.814.535.500,00
12. Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp	709.415.217,00



**Tabel 2.2 Sasaran dan Program
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM	SATUAN	TARGET RPJMD 2022
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan.	Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Infrastruktur Jalan	%	80,74
			Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan		89,01%
			Indeks Infrastruktur Jembatan		76,10
			Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan		77,23%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga		85,03
			Nilai IKM Dinas PU Bina Marga		86

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

a. Kepala Dinas

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan.	Indeks Infrastruktur Jalan	80,74%
		Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	89,01%
		Indeks Infrastruktur Jembatan	76,10%
		Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan	77,23%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga	85,03



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Nilai IKM Dinas PU Bina Marga	86

Jumlah Anggaran Program, Kegiatan (Sub Kegiatan) Tahun 2022 PAK sebesar:
Rp. 219.361.419.725,0

1) Program dan Kegiatan:

PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 212.354.257.000,00	APBD dan DAK
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 7.007.162.725,00	APBD

b. Sekretaris Dinas

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja, dan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100,00 %
2.	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja, dan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100,00 %
3	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase aparatur yang disiplin	100,00 %
4	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik	100,00 %
5.	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	100,00 %
6.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik	100,00 %



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit Kerja penunjang urusan pemerintahan yang terlayani dengan baik	100,00 %

Jumlah Anggaran Kegiatan (Sub Kegiatan) Tahun 2022 sebesar: Rp. 6.947.162.725,00

a) Program dan Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket.
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.905.590,00	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.795.298.125,00	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.284.000,00	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	303.731.800,00	APBD
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	283.672.000,00	APBD
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.008.198.000,00	APBD
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.073.210,00	APBD

c. Kepala Bidang Pengelolaan Jalan

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	Panjang jalan kabupaten	80.840 m

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Tahun 2022 sebesar: Rp. 72.464.737.000,00

1	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	72.464.737.000	APBD



d. Kepala Bidang Pengolaan Jembatan

**Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2022**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jembatan.	Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	16 Unit

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	14.690.302.400,00	APBD

e. Kepala Bidang Sarana Prasarana Kebinamargaan

**Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Sarana Prasarana
Kebinamargaan
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan .	Jumlah Data dan Informasi Terkait Jalan / Jembatan.	3 Dokumen
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	3 Dokumen
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan	Jumlah Alat Besar Yang Terpelihara dan Dibayarkan Perizinannya	3 Unit



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Pengelolaan Leger Jalan	Rp. 750.000.000	APBD
2	Survey Kondisi Jalan / Jembatan	Rp. 300.000.000	APBD
	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya	Rp. 50.000.000	
3	Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		APBD
	JUMLAH	Rp. 1.100.000.000	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan indikator pencapaian keberhasilan pembangunan di bidang kebinamargaan dapat dilihat dari meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan meningkatnya Jumlah Jembatan Kabupaten Kondisi Baik.

Secara garis besar dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan pada Perencanaan Strategis untuk tahun 2022 dari segi Output seluruhnya telah dapat dilaksanakan sedangkan dari segi Outcome beberapa indikator belum dapat dihitung. Hal ini karena belum tersedianya data kinerja, yang saat ini masih dalam taraf pengembangan ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

A.1 Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator disajikan pada tabel pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2022

Pencapaian kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan. Adapun Tabel Pencapaian Kinerja disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama 2022
Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja Th. 2022 (%)
Meningkatnya	Indeks Infrastruktur Jalan	85,11	82,18	101,78



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja Th. 2022 (%)
kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	89,01	83,98	94,35
	Indeks Infrastruktur Jembatan	76,10	79,51	104,60
	Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan	77,23	77,23	100,00
	Nilai SAKIP Dinas PU. Bina Marga	85,03	-	-
	Nilai IKM Dinas PU. Bina Marga	86	86,04	100,05

Dari table di atas terlihat bahwa capaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian prosentase Indeks Infrastruktur Jalan sebesar 101,78% hal ini menunjukkan tercapainya target indikator sasaran kinerja tahun 2022 dengan realisasi sebesar 82,18% atau melampaui target. Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan sebesar 94,35% hal ini menunjukkan tercapainya target indikator sasaran kinerja tahun 2022 dengan realisasi sebesar 83,98% atau melampaui target. Indeks Infrastruktur Jembatan sebesar 104,60% hal ini menunjukkan tercapainya target indikator sasaran kinerja tahun 2022 dengan realisasi sebesar 79,51% atau melampaui target. Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan mencapai 100,00% dengan realisasi sebesar 77,23% atau melampaui target. Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan mencapai 100,00% dengan realisasi sebesar 77,23% atau melampaui target. Nilai SAKIP Dinas PU. Bina Marga belum ada realisasi. Serta Nilai IKM Dinas PU. Bina Marga dengan nilai 100,05% dengan realisasi sebesar 86,04% atau melampaui target.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Keberhasilan suatu Institusi dalam mengemban tugas dapat diukur dari sejauh mana institusi tersebut dapat merealisasikan program-programnya sebagaimana yang tercantum dalam ketetapan



kinerja. Indikator dan Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	Indeks Infrastruktur Jalan	85,06	85,11	100,05	80,74	82,18	101,78
		Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	95,22	95,27	100,05	89,01	83,98	94,35
		Indeks Infrastruktur Jembatan	83,97	85,18	101,44	76,10	79,51	104,60
		Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan	80,00	81,15	101,43	77,23	77,23	100,00
		Nilai SAKIP Dinas PU. Bina Marga	85,82	85,82	100	85,03	-	-
		Nilai IKM Dinas PU. Bina Marga	85	85	100	86	86,04	100,05

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Dinas PU Bina Marga pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disesuaikan dengan perubahan SK Bupati Lamongan Nomor: 188/368/KEP/413.013/2020 dengan total panjang jalan kabupaten yang sebelumnya 416,116 km menjadi 665,475 km.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Priode RPJMD/RENSTRA

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022 dengan tahun sebelumnya. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka



pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun hasil evaluasi kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:



**Tabel 3.3 Capaian Dan Target Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2022**

Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya Saing
Misi 3 : Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan

No	Sasaran	No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Baseline 2020	Tahun 2021			Tahun 2022			PD yang menangan ni Urusan
							Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan	1	Indeks Infarstruktur Jalan	1. Menghitung persentase panjang jalan kondisi mantap 2. Menghitung score 3. Pembobotan score	Indeks	79.05	85.06	85.11	100.05%	80.74	82.18	101.8%	Dinas PU Bina Marga
		2	Indeks Infrastruktur Jembatan	1. Menghitung persentase unit jembatan kondisi mantap 2. Menghitung score 3. Pembobotan score	Indeks	78.69	83.97	85.18	101.44%	76.10	79.51	104.5%	
	Program : Program Penyelenggaraan Jalan	1	Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap}}{\text{Total Panjang jalan kabupaten}} \times 100$	%	84.20%	95.22%	95.27%	100.05%	89.01%	83.98%	94.35%	
		2	Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan	$\frac{\text{Jumlah Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap}}{\text{Jumlah Jembatan Kabupaten Seluruhnya}} \times 100$	%	83.22%	80.00%	81.15%	101.43%	77.23%	77.23 %	100%	



No	Sasaran	No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Baseline 2020	Tahun 2021			Tahun 2022			PD yang menanganikan Urusan
							Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Sasaran:</u> Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah	1	Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga	Nilai SAKIP merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi, internal, dan pencapaian kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	Nilai	84,78	85,82	85,82	100	85,03	-	-	
	<u>Program :</u> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2	Nilai IKM Dinas PU Bina Marga	Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah dengan melakukan survey kepada 100 orang terhadap 9 variabel pelayanan yakni: 1. Persyaratan pelayanan 2. Prosedur pelayanan 3. Waktu pelayanan 4. Biaya pelayanan 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Maklumat pelaksana 9. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	Nilai	84	85	85	100	86	86,04	100,05	



SASARAN 1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan

Indikator Kinerja 1 Indeks Infarstruktur Jalan

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan, dimana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh program penyelenggaraan jalan (1 Kegiatan) dengan 8 (delapan) sub kegiatan yakni: a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan; b) Pembebasan lahan/ tanah untuk penyelenggaraan jalan dan jembatan; c) Survey kondisi jalan/ jembatan; d) Pelebaran jalan menuju standar; e) Rekonstruksi jalan; f) Rehabilitasi jalan; g) Pemeliharaan berkala jalan; h) Pemeliharaan rutin jalan.

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %
Indeks Infarstruktur Jalan	80,74	82,18

Indeks infrastruktur jalan pada tahun 2022 adalah mencapai 82,18 dari target 80,74 sebagaimana pada keterangan tabel diatas.

SASARAN 2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan

Indikator Kinerja 2 Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan

Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan kabupaten dalam kondisi baik merupakan Indikator Kinerja Utama guna pencapaian sasaran tersebut, didukung oleh program penyelenggaraan jalan (1 Kegiatan) dengan 3 (tiga) sub kegiatan yakni Penggantian jembatan, Rehabilitasi jembatan, dan Pemeliharaan rutin jembatan.



Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %
Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	89,01%	83,98

Peningkatan Jumlah Jembatan Kabupaten pada tahun 2022 adalah mencapai 81.15% dari target 80.00 %. Sebagaimana yang diterangkan pada tabel diatas.

SASARAN 3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	
Indikator Kinerja 3	Indeks Infrastruktur Jembatan

Prosentase jumlah Jembatan kabupaten dalam kondisi baik merupakan Indikator Kinerja Utama guna pencapaian sasaran tersebut, didukung oleh program penyelenggaraan jalan (1 Kegiatan) dengan 3 (tiga) sub kegiatan yakni Penggantian jembatan, Rehabilitasi jembatan, dan Pemeliharaan rutin jembatan.

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %
Indeks Infrastruktur Jembatan	76,01	79,51

Peningkatan Jumlah Jembatan Kabupaten pada tahun 2022 adalah mencapai 79,51% dari target 76,01%. Sebagaimana di pada tabel diatas.

SASARAN 4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	
Indikator Kinerja 4	Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan

Prosentase jumlah Jembatan kabupaten dalam kondisi baik merupakan Indikator Kinerja Utama guna pencapaian sasaran tersebut, didukung oleh program penyelenggaraan jalan (1 Kegiatan) dengan 3



(tiga) sub kegiatan yakni Penggantian jembatan, Rehabilitasi jembatan, dan Pemeliharaan rutin jembatan.

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %
Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan	77,23	77,23

Peningkatan Jumlah Jembatan Kabupaten pada tahun 2022 adalah mencapai 77,23% dari target 77,23%. Sebagaimana di pada tabel diatas.

SASARAN 5 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan

Indikator Kinerja 5 Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga

Prosentase nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga merupakan Indikator Kinerja Utama guna pencapaian sasaran tersebut, didukung oleh Nilai SAKIP merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi, internal, dan pencapaian kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat.

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %
Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga	85,03	-

Peningkatan Jumlah Jembatan Kabupaten pada tahun 2022 adalah belum diketahui dari target 85,03%. Sebagaimana di pada tabel diatas.

SASARAN 6 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan

Indikator Kinerja 6 Nilai IKM Dinas PU Bina Marga



Prosentase Nilai IKM Dinas PU Bina Marga pada tahun 2022 dildapat dari hasil survey kepada 100 orang terhadap 9 variabel pelayanan yakni: 1) Persyaratan pelayanan; 2) Prosedur pelayanan; 3) Waktu pelayanan; 4) Biaya pelayanan; 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6) Kompetensi pelaksana; 7) Perilaku pelaksana; 8) Maklumat pelaksana

Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %
Nilai IKM Dinas PU Bina Marga	86	86,04

Dari tabel diatas dapat dilihat output Nilai IKM Dinas PU Bina Marga tahun 2022 yaitu dengan target 86% dan realisasi sebesar 86,04%.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Realisasi kinerja ini membandingkan antara target dan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan realisasi nasional. Namun di tahun 2022 ini nihil atau tidak ada perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional.

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan. Adapun Indikator kinerja sasaran Dinas PU Bina Marga dijelaskan sebagai berikut:

- a) Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan dengan target 89,01%;
- b) Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan dengan target 77,23%;
- c) Indeks Infrastruktur Jalan dengan target 80,74;
- d) Indeks Infrastruktur Jembatan dengan target 76,01%;
- e) Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga dengan target 85,03%; dan



f) Nilai IKM Dinas PU Bina Marga dengan target 86%.

Prosentase Kemantapan Infrastruktur Jalan yang semula ditargetkan mencapai 89,01% terealisasi 83,98% atau belum mencapai target. Kemantapan Infrastruktur Jembatan yang semula ditargetkan mencapai 77,23% terealisasi sebesar 79,51%. Indeks infrastruktur jalan yang semula ditargetkan mencapai 80,74% terealisasi sebesar 82,18%. Indeks Infrastruktur Jembatan yang semula ditargetkan mencapai 76,01% terealisasi sebesar 79,51%. Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga yang semula ditargetkan sebesar 85,03% dengan realisasi yang belum diketahui. Nilai IKM Dinas PU Bina Marga dengan target 86% terealisasi sebesar 86,04%. Secara keseluruhan indikator kinerja Dinas PU Bina Marga pada tahun 2022 masuk dalam kategori "sangat berhasil" dengan target 78,42% dan terealisasi sebesar 80,845%, meskipun terdapat beberapa penurunan target. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1) Perubahan SK Bupati Lamongan Nomor: 188/368/KEP/413.013/2020, yang didalamnya memuat tentang penambahan total panjang jalan kabupaten yang sebelumnya 416,116 km menjadi 665,475 km; 2) Tingginya intensitas curah hujan di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022; 3) Kondisi jalan yang tergenang banjir di beberapa ruas yang cukup lama; serta 4) Dampak perubahan arus lalu lintas akibat jebolnya jembatan Ngaglik.

Secara garis besar tidak ada penurunan bahkan mengalami peningkatan jika total panjang jalan tidak berubah. Hal yang menentukan nilai Indikator Kinerja Dinas PU Bina Marga tetap positif karena didukung Program penyelenggaraan jalan (1 Kegiatan) dengan 11 (sebelas) sub kegiatan yakni: a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan; b) Pembebasan lahan/ tanah untuk penyelenggaraan jalan dan jembatan; c) Survey kondisi jalan/ jembatan; d) Pelebaran jalan menuju standar; e) Rekonstruksi jalan; f) Rehabilitasi jalan; g) Pemeliharaan berkala jalan; h) Pemeliharaan rutin jalan; i) Penggantian jembatan; j) Rehabilitasi jembatan; dan k) Pemeliharaan rutin jembatan.



1. Adapun hal-hal yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain:
 - a) Perencanaan teknis yang matang dan pengawasan yang tepat dalam pelaksanaan Program penyelenggaraan jalan;
 - b) Pelaksanaan kegiatan tutup lobang yaitu segera menambal lubang yang ada di Jalan Kabupaten sehingga tidak memperparah kerusakan jalan;
 - c) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala dan rutin jalan yang optimal sebagai pendukung dalam menjaga kondisi jalan tetap baik, sehingga jalan menjadi lebih layak untuk dilalui.

Untuk mempertahankan keberhasilan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Optimalisasi program penyelenggaraan jalan sesuai skala prioritasnya;
- b) Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap target dan realisasi indikator kinerja;
- c) Koordinasi yang baik antara bidang terkait konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan penanganan jalan agar tetap dalam kondisi baik;
- d) Pengadaan alat berat untuk menunjang kegiatan pemeliharaan jalan;
- e) Pelaksanaan bimbingan teknis sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan tentang peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan.

A.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan mengharuskan untuk melakukan optimalisasi terhadap pemanfaatan personil yang tersedia, ketimpangan jumlah personil yang mempunyai kompetensi teknis



memadai dengan beban kerja yang masih cukup besar dilakukan dengan memanfaatkan ketersediaan konsultan baik perencanaan maupun pengawasan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dengan menekan beban pembiayaan.

Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara terpusat melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan sistem elektronik memungkinkan untuk mendapatkan penyedia barang dan jasa yang mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan (Kontrak). Demikian juga pengawasan yang semakin baik akan memberikan efisiensi sumber daya dari semua aspek pekerjaan.

A.7 Analisis Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dengan melihat hasil dari Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT) dan Evaluasi terhadap capaian sasaran dengan cara Pengukuran Pencapaian Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, yang terdiri dari Input, Output dan Outcome dengan hasil yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan menunjukkan capaian dengan makna Baik.

Dari hasil tersebut seluruh kegiatan/ program yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan dapat mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dikarenakan kerja keras dan dukungan dari stakeholder dengan tetap memaksimalkan keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Prestasi:

Dilihat dari hasil Pengukuran Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan dapat mengevaluasi Indikator Outcome sebagai berikut, yakni: Program Penyelenggaraan Jalan dengan 1 Kegiatan dan 11 Sub kegiatan masing-masing mencapai prestasi 100%.

B. Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana



Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pada tahun 2022 Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan dengan alokasi anggaran pembangunan setelah perubahan sebesar Rp. 218.849.248.405,00 (Dua Ratus Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 207.502.746.224,81 Dua Ratus Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Satu) atau 94.85% adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan pada Tahun 2022 dengan alokasi dana dan realisasi anggaran sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Realisasi Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2022**

KODE REKENING					URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PROSEN TASE (%)
1					2	3	4	5
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	218.849.248.405	207.502.746.224,8 1	94,85
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.399.991.405,00	7.144.309.345,35	96,54
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	276.755.590,00	260.088.600,00	93,98
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.640.700,00	38.547.100,00	99,76
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	100
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	218.114.890,00	201.541.500,00	92,40
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.972.760.805,00	4.874.876.174,00	98,03
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4.957.760.805,00	4.859.876.174,00	98,03



KODE REKENING					URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PROSEN TASE (%)
					ASN			
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.500.000,00	7.500.000,00	100
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.500.000,00	7.500.000,00	100
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.500.000,00	49.116.000,00	99,22
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.000.000,00	26.616.000,00	98,58
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.500.000,00	22.500.000,00	100
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.579.900,00	327.702.700,00	99,43
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.615.500,00	41.615.500,00	100
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.355.000,00	67.212.400,00	99,79
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.822.200,00	41.817.200,00	99,99
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.782.300,00	64.330.000,00	99,30
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.922.000,00	36.922.000,00	100
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	62.029.900,00	60.880.000,00	98,15
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.053.000,00	14.925.600,00	99,15
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	241.411.900,00	238.218.000,00	98,68
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.260.100,00	40.900.000,00	96,78
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	199.151.800,00	197.318.000,00	99,08
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.017.510.000,00	886.243.410,00	87,10



KODE REKENING					URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PROSEN TASE (%)
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	100
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.550.000,00	120.464.380,00	65,99
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.500.000,00	22.495.000,00	99,98
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	807.460.000,00	738.284.030,00	91,43
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512.473.210,00	508.064.461,35	99,14
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	17.500.000,00	100
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	197.882.600,00	194.574.300,00	98,33
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	60.000.000,00	59.445.350,00	99,08
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000,00	70.000.000,00	100
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	167.090.610,00	166.544.811,35	99,67
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	211.449.257.000,00	200.448.701.879,46	94,80
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	211.449.257.000,00	200.448.701.879,46	94,80
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	400.000.000,00	391.116.900,00	97,78
1	03	10	2.01	03	Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	50.200.000.000,00	42.914.136.224,00	85,49
1	03	10	2.01	04	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	1.159.086.900,00	1.144.485.764,61	98,74
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan menuju	1.542.397.600,00	1.512.852.000,00	98,08



KODE REKENING					URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PROSEN TASE (%)
					Standar			
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	114.220.709.678,00	111.357.877.004,00	97,49
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	2.125.417.969,00	2.119.472.800,00	99,72
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala jalan	13.235.743.026,00	13.024.972.300,00	98,41
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	12.547.245.193,00	12.434.046.856,85	99,10
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	13.494.705.917,00	13.049.768.075,00	96,70
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	1.814.535.500,00	1.796.508.025,00	99,01
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	709.415.217,00	703.465.930,00	99,16

Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), mengingat alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah daerah pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan sebagaimana dalam APBD 2022 pada dasarnya untuk mendukung keberhasilan Tugas Pokok dan Fungsi yang di emban oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan, namun demikian analisis capaian kinerja efisiensi harus dilakukan untuk mendukung prinsip-prinsip penganggaran

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program/ kegiatan yang di laksanakan, demikian juga untuk mengukur seberapa besar tupoksi yang telah dilaksanakan dapat diketahui dari sasaran yang telah ditetapkan.

1. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut:

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direalisasikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 218.849.248.405,00 dan terealisasi sebesar Rp. 207.502.746.224,81 atau 94,85%. Dengan sisa anggaran sebesar Rp. 11.346.502.180,19. Adapun rincian anggaran pembangunan sebagai berikut:



**a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**

**1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 276.755.590,00 dan Terealisasi Sebesar Rp. 260.088.600,00 atau 93,98%. Dengan Prosentase Kegiatan 100% dan terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan:

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 38.640.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 38.547.100,00 Atau 99,76% Dengan Prosentase Fisik 100 %.
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 20.000.000,00 Atau 100% Dengan Prosentase Fisik100 %.
- c) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 218.114.890,00 dan terealisasi sebesar 201.541.500,00 atau 92,40%. Dengan Prosentase Fisik100 %.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 4.972.760.805,00 dan Terealisasi Sebesar Rp. 4.874.876.174,00 atau 98,03%. Dengan Prosentase Kegiatan 100% dan terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan:

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 4.957.760.805,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.859.876.174,00 Atau 98,03% dengan Prosentase Fisik 100%.
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 7.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.500.000,00 atau 100 % Dengan Prosentase Fisik 100 %.
- c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, Dengan Alokasi anggaran



sebesar Rp. 7.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 7.500.000,00 atau 100% Dengan Prosentase Fisik 100%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 49.500.000,00 dan Terealisasi Sebesar Rp. 49.116.000,00 atau 99,22%. Dengan Prosentase Kegiatan 100% dan terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan:

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 27.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 26.616.000,00 atau 98,58% Dengan Prosentase Fisik 100%.
- b) Sub Kegiatan Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.500.000,00 atau 100% dengan prosentase Fisik 100%.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 329.579.900,00 dan Terealisasi Sebesar Rp. 327.702.700,00 atau 99,43%. Dengan Prosentase Kegiatan 100% dan terdiri dari 7 (Tujuh) Sub Kegiatan :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 41.615.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 41.615.500,00 atau 100% Dengan Prosentase Fisik 100%.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 67.355.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 67.212.400,00 atau 99,79% dengan prosentase fisik 100%.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 41.822.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 41.817.200,00 Atau 99,99 % Dengan Prosentase Fisik 100%.
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 64.782.300,00 dan terealisasi



sebesar Rp. 64.330.000,00 Atau 99,30% Dengan Prosentase Fisik 100%.

- e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 36.922.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 36.922.000,00 Atau 100% dengan prosentase fisik 100%.
- f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 62.029.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 60.880.000,00 Atau 98,15% Dengan Prosentase Fisik 100%.
- g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 15.053.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.925.600,00 Atau 99,15% dengan prosentase fisik 100%.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 241.411.900,00 dan Terealisasi Sebesar Rp. 238.218.000,00 atau 99,18%. Dengan Prosentase Kegiatan 100% dan terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan :

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.260.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.900.000,00 atau 96,78% Dengan Prosentase Fisik 100%.
- b) Pengadaan Mebel, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 199.151.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 197.318.000,00 atau 99,08% Dengan Prosentase Fisik 100%.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.017.510.000,00 dan Terealisasi Sebesar Rp. 886.243.410,00 atau 87,10%. Dengan Prosentase Kegiatan 100% dan terdiri dari 4 (Empat) Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,00 atau 100% dengan prosentase fisik 100%.



- b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 182.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 120.464.380,00 atau 65,99% dengan prosentase fisik 100%.
- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 22.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 22.495.000,00 atau 99,98% dengan prosentase fisik 100 %.
- d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 807.460.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 738.284.030,00 atau 91,43% dengan prosentase fisik 100%.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 512.473.210,00 dan Terealisasi Sebesar Rp. 508.064.461,35 atau 99,14%. Dengan Prosentase Kegiatan 100 % dan terdiri dari 5 (Lima) Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 17.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 17.500.000,00 atau 100% Dengan Prosentase Fisik 100 %.
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 197.882.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 194.574.300,00 atau 98,33% Dengan Prosentase Fisik 100 %.
- c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 59.445.350,00 atau 99,08% Dengan Prosentase Fisik 100 %.
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.



70.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 70.000.000,00 atau 100% dengan prosentase fisik 100%.

- e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 167.090.610,00 dan terealisasi sebesar Rp. 166.544.811,35 atau 99,67% dengan prosentase fisik 100%.

b) Program Penyelenggaraan Jalan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar 400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 391.116.900,00 atau 97,78%, dengan prosentase fisik 100%. Terdiri dari 4 (Empat) paket pekerjaan, yaitu:

- 1) Studi kelayakan investasi peningkatan jalan Kab. Lamongan wilayah selatan;
 - 2) Studi kelayakan investasi peningkatan jalan Kab. Lamongan wilayah tengah;
 - 3) Studi kelayakan investasi peningkatan jalan Kab. Lamongan wilayah utara;
 - 4) Studi kelayakan investasi peningkatan jalan Kab. Lamongan wilayah utara 2.
- 1) Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, dengan anggaran sebesar Rp. 50.200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 42.914.136.224,00 atau 85,49% dengan prosentase fisik 100 %. Terdiri dari satu paket pekerjaan dengan panjang 4200 meter, yaitu: pembebasan lahan jalan lingkaran utara (Ring Road Utara).
 - 2) Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.159.086.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.144.485.764,61 atau 98,74%, dengan prosentase fisik 100 %. Terdiri 10 (Sepuluh) dokumen pekerjaan, meliputi:
 1. Pembangunan Titik Nol Km Lamongan;
 2. Pembuatan leger jalan Made-Plosowahyu;



3. Pembuatan leger jalan raya Tambakboyo;
 4. Pembuatan leger jalan Soekarno Hatta;
 5. Pembuatan Program Aplikasi Sirkel Plus Berbasis Website;
 6. Penajaman Data Base Jalan (Survey Kondisi Jalan) Wilayah Selatan;
 7. Penajaman Data Base Jalan (Survey Kondisi Jalan) Wilayah Utara;
 8. Penajaman Data Base Jalan (Survey Kondisi Jembatan) Wilayah Selatan;
 9. Penajaman Data Base Jalan (Survey Kondisi Jembatan) Wilayah Utara;
 10. Sistem informasi data jalan milik Lamongan (SIDJAMILA);
- 3) Pelebaran Jalan Menuju Standar, dengan alokasi sebesar Rp. 1.542.397.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.512.852.000,00 atau 98,08%, dengan prosentase fisik 100 %. Terdiri dari 1 (satu) Paket pekerjaan sepanjang 1000 meter, yaitu: Pelebaran Jalan Paciran-Godog
- 4) Rekonstruksi Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 114.220.709.678,00 dan terealisasi sebesar Rp. 111.357.877.004,00 atau 97,49%, dengan prosentase fisik 100%. Terdiri dari 39 (Tiga puluh Sembilan) paket pekerjaan dengan panjang 29.310 meter, meliputi;
1. Peningkatan jalan Laren-Blimbing;
 2. Peningkatan jalan Sukodadi-Sumberwudi;
 3. Peningkatan jalan Sukodadi-Plembon;
 4. Peningkatan jalan Banjarwati-Petiin;
 5. Peningkatan jalan Bluluk-Sukorame;
 6. Peningkatan jalan Gembong-Dempe;l
 7. Peningkatan jalan Jatipayak-Mojorejo;
 8. Peningkatan jalan Kalen-Jatipayak;
 9. Peningkatan jalan Kalen-Kedungpring;
 10. Peningkatan jalan Kiringan-Dibe;
 11. Peningkatan jalan Laren-Keduyung;



12. Peningkatan jalan Mantup-Ayamalas;
 13. Peningkatan jalan Mantup-Sambeng;
 14. Peningkatan jalan Mojorejo-Jegreg;
 15. Peningkatan jalan Nguwok-Tlanak;
 16. Peningkatan jalan Plaosan-Gendong Kulon;
 17. Peningkatan jalan Plembon-Sugio;
 18. Peningkatan jalan Pucuk-Sekaran;
 19. Peningkatan jalan Pule-Sarirejo;
 20. Peningkatan jalan Sidokumpul-Tunjungmekar;
 21. Peningkatan jalan Soko-Dagang;
 22. Peningkatan jalan Soko-Karangbinangun;
 23. Peningkatan jalan Sugio-Kedungdadi;
 24. Peningkatan jalan Sugi-Tlanak;
 25. Peningkatan jalan Sukorame-Sembung;
 26. Peningkatan jalan Sukorame-Slaji;
 27. Peningkatan jalan Sumberdadi-Sumberkerep;
 28. Peningkatan jalan Sumberwudi-Maduran;
 29. Peningkatan jalan Tlanak-Sumengko;
 30. Peningkatan jalan Tunjungmekar-Samboppinggir;
 31. Peningkatan jalan Turi-Kiringan;
 32. Peningkatan jalan Turi-Pucangro;
 33. Peningkatan jalan Wanar-Bedigin;
 34. Peningkatan jalan Waru Kulon-Lebak Adi;
 35. Peningkatan jalan Deket-Soko;
 36. Peningkatan jalan Sukorejo-Ngujungrejo;
 37. Peningkatan jalan Sunan Giri; dan
 38. Peningkatan jalan Veteran.
- 5) Rehabilitasi Jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.125.417.969,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.119.472.800,00 atau 99,72%, dengan rosentase fisik 100%. Terdiri dari 2 (Dua) paket pekerjaan dengan panjang 390 meter, meliputi;
1. Rehabilitasi Jalan Veteran;
 2. Rehabilitasi Jalan Kinameng 1.



- 6) Pemeliharaan Berkala Jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.235.743.026,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.024.972.300,00 atau 98,41% , dengan prosentase fisik 100%. Terdiri dari 28 (Dua Puluh Delapan) paket pekerjaan dengan panjang 2.380 meter, meliputi;
1. Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Karangembang-Gedongkulon;
 2. Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Lopang-Kramat;
 3. Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Mendolo-Mluwur;
 4. Pemeliharaan Berkala Jalan Made-Plembon;
 5. Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Tikung-Sumberkerep;
 6. Pemeliharaan Berkala Jalan Dermolemahbang-Balongwangi;
 7. Pemeliharaan Berkala Jalan Dermolemahbang-Beru;
 8. Pemeliharaan Berkala Jalan Kacangan-Balongwangi;
 9. Pemeliharaan Berkala Jalan Sarirejo-Jatirambe;
 10. Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Sidokumpul-Tunjungmekar;
 11. Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Pule-Sarirejo;
 12. Pemeliharaan Berkala Jalan Deket-Soko;
 13. Pemeliharaan Berkala Jalan Made-Plembon;
 14. Pemeliharaan Bekala Jalan Pamotan-Sumberdadi;
 15. Pemeliharaan Berkala Jalan Sukodadi-Sumberwudi;
 16. Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Dinoyo-Kentong;
 17. Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Dlangu-Dinoyo;
 18. Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Mantup-Mojosari;
 19. Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Sukorame-Sambung;
 20. Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Tunjungmekar-Sambopinggir;



21. Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Plembon-Sugio;
 22. Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Soko-Dagang;
 23. Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Tebluru-Paciran;
 24. Pemeliharaan Berkala Jalan Menanggal-Wates;
 25. Pemeliharaan Berkala Jalan Ngasemlemabang-Gegantingan;
 26. Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Solokuro-Dadapan;
 27. Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Sumberdadi-Sumberkerep; dan
 28. Pemeliharaan Berkala Jalan Pule-Kedungwaras.
- 7) Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.547.245.193,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.434.046.856,85 atau 99,10%, dengan prosentase fisik 100%. Terdiri dari 84 (Delapan Puluh Empat) paket pekerjaan dengan panjang 47.000 meter, meliputi;
1. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Bluluk-Talunrejo;
 2. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Jelakatur-Kendalkemlagi;
 3. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Kendalkemlagi-Latukan;
 4. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Kranji-Payaman;
 5. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Lopang-Kramat;
 6. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Majenang-Sidomlangean;
 7. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Mantup-Mojosari;
 8. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Pule-Kedungwaras;
 9. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sidokumpul-Tunjungmekar;
 10. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sukodadi-Menongo;
 11. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sukorejo (Rs. Muhammadiyah)-Ngujungrejo;
 12. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sumberdadi-Sumberkerep;
 13. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Tebluru-Paciran;
 14. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sugio-Kedungdadi;
 15. Pengadaan Bahan Bahu Jalan Wilayah Selatan;
 16. Pengadaan Bahan Bahu Jalan Wilayah Tengah;



17. Pengadaan Bahan Bahu Jalan Wilayah Utara;
18. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Paving Wilayah Selatan;
19. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Paving Wilayah Tengah;
20. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Paving Wilayah Utara 1;
21. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Paving Wilayah Utara 2;
22. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Bakalanrejo-Gondanglor;
23. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Bluluk-Sukorame;
24. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Bluri-Tlogosadang;
25. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Dalam Kota;
26. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Deket Soko;
27. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Dradah-Bluluk;
28. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Dradah-Kedungpring;
29. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Dumpi-Sukobendu;
30. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Gampang-Petiin;
31. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Gembong-Dempel;
32. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Gotong Royong Kota Babat;
33. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Jl. Raya Tambakboyo;
34. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Jl. Surojoyo;
35. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Jl. Syech Hisyamudin;
36. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Kalen Kedungpring;
37. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Karangkembang-Gendongkulon;
38. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Kedungbanjar-Kedungdadi;
39. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Kedungdadi-Kradenanrejo;
40. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Kedungdadi-Moropelang;
41. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Kedungpring-Sukobendu;
42. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Kembangbahu-Kalipang;
43. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Kembangbahu-Sukobendu;
44. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Kiringan-Dibe;
45. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Lamongrejo-Gegantingan;
46. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Lamongrejo-Garung;
47. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Laren-Blimbing;
48. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Lonjong-Mendolo;
49. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Made-Plembon;



50. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Made-Plosowahyu;
51. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Mantup-Ayamalas;
52. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Mantup-Sambeng;
53. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Mendolo-Mluwur;
54. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Menengai-Wates;
55. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Ngarum-Bulutengger;
56. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Ngasemlemahbang-Gagantingan;
57. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Ngimbang-Bluluk;
58. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Paciran-Godog;
59. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Penanjang-Sendangduwur;
60. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Petiin-Banjarwati;
61. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Plembon-Sugio;
62. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Plembon-Sukodadi;
63. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Pucuk-Sekaran;
64. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sambeng-Garung;
65. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sambeng-Ngimbang;
66. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sarirejo-Jatirambe;
67. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sekaran-Laren;
68. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Soko-Dagang;
69. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Soko-Karangbinangun;
70. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Solokuro-Dadapan;
71. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sugio-Tlanak;
72. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sukodadi-Sumberwudi;
73. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sukorame-Sembung;
74. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sukorame-Slaji;
75. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sumberwudi-Karanggeneng;
76. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sumberwudi-Maduran;
77. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Sumberwudi-Tunjungmekar;
78. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Tanjung-Songowareng;
79. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Tikung-Kembangbahu;
80. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Tikung-Sumberkerep;
81. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Tlanak-Kedungpring;
82. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Tlanak-Nguwok;



83. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Tunjungmekar-Samboppinggir; dan
84. Pengadaan Bahan Ruas Jalan Turi-Kiringan.
- 8) Penggantian Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.494.705.917,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.049.768.075,00 atau 96,70%, dengan prosentase fisik 100%. Terdiri dari 27 (Dua Puluh Tujuh) paket pekerjaan, yaitu;
1. Pelebaran Jembatan di Ruas Turi-Kiringan;
 2. Penggantian Gorong-gorong Babatagung di ruas jalan Dinoyo-Kentong;
 3. Penggantian Gorong-gorong di Ruas Jalan Dadapan-Solokuro (Tenggulun);
 4. Penggantian Gorong-gorong di Ruas Jalan Gedongkulon-Plaosan;
 5. Penggantian Gorong-gorong di Ruas Jalan Made-Plosowahyu;
 6. Penggantian Gorong-gorong di Ruas Jalan Mantup-Sambeng (Nogojatisari);
 7. Penggantian Gorong-gorong di Ruas Jalan Pamotan-Sumberdadi (Pamotan 2);
 8. Penggantian Gorong-gorong di Ruas Jalan Plembon-Sukodadi (Sumberaji);
 9. Penggantian Gorong-gorong di Ruas Jalan Sugio-Tlanak;
 10. Penggantian Gorong-gorong di Ruas Jalan Sunan Giri;
 11. Penggantian Gorong-gorong di Ruas Jalan Tunjungmekar-Samboppinggir;
 12. Penggantian Gorong-gorong di Ruas Jalan Dinoyo-Kentong;
 13. Penggantian Jembatan di Ruas Jalan Sambeng-Candisari;
 14. Penggantian Jembatan di Ruas Jalan Pamotan-Sumberdadi (Pamotan 1);
 15. Penggantian Jembatan di Ruas Jalan Pucuk-Sekaran;
 16. Penggantian Jembatan di Ruas Jalan Sukorame-Sembung;
 17. Penggantian Jembatan di Ruas Jalan Langan IV Tengah di Ruas Sugio-Tlanak;



18. Penggantian/ Pembangunan Gorong-gorong Tawangrejo di Ruas Turi-Gedongboyo Untung;
 19. Penggantian/ Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Laren-Blimbing (Ds. Sumberagung);
 20. Penggantian/ Peningkatan Gorong-gorong di Ruas Sumberwudi-Karanggeneng (depan SMPN Karanggeneng);
 21. Peningkatan Gorong-gorong di ruas Jalan Sekaran-Laren (Box Culvert);
 22. Peningkatan Gorong-gorong di ruas jalan Sugio-Tlanak (depan rumah kubah);
 23. Peningkatan gorong-gorong di ruas jalan Sukobendu-Kedungpring (Ds. Dalinawong);
 24. Peningkatan gorong-gorong di ruas jalan Sumberwudi-Maduran;
 25. Peningkatan gorong-gorong di ruas jalan Sumberwudi-Tunjungmekar;
 26. Peningkatan gorong-gorong di ruas jalan Sumberwudi-Tunjungmekar (Dsn. Dadungan); dan
 27. Peningkatan gorong-gorong di ruas jalan Sumberwudi-Tunjungmekar (Dsn. Kediren 2).
- 9) Rehabilitasi Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.814.535.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.796.508.025,00 atau 99,01%, dengan prosentase fisik 100%. Terdiri dari satu unit pekerjaan yaitu Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Jalan Sambeng-Ngimbang (Dsn. Klubuk, Ds. Sumbersari, Kec. Sambeng).
- 10) Pemeliharaan Rutin Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 709.415.217,00 dan terealisasi sebesar Rp. 703.465.930,00 atau 99,16%, dengan prosentase fisik 100%. Terdiri dari 8 (delapan) unit pekerjaan, yaitu;
- 1) Rehabilitasi Gorong-gorong di Ruas Jalan Plembon-Sugio;
 - 2) Rehabilitasi Gorong-gorong di Ruas Jalan Sukobendu-Kedungpring;
 - 3) Rehabilitasi Jembatan di Ruas Jalan Gampang-Petiin;
 - 4) Rehabilitasi Jembatan di Ruas Jalan Sambeng-Garung;



- 5) Rehabilitasi Jembatan di Ruas Jalan Soko-Karangbinangun;
- 6) Rehabilitasi Jembatan Dukuh Tunggal di ruas jalan Soko-Dagang;
- 7) Rehabilitasi Jembatan Mireng desa Payaman Kecamatan Solokuro;
- 8) Rehabilitasi Jembatan Sudirman di Ruas Jalan Sumberwudi-Karanggeneng.

c) Pendapatan Dinas Pu Bina Marga

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Sewa Alat Berat	85.000.000	85.190.000	85.000.000	85.265.000
		0	0	0	
2	Penjualan Pohon	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	JUMLAH	90.000.000	90.190.000	90.000.000	90.265.000
		0	0	0	



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan tahun 2022 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya.

Namun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik sesuai program yang telah ditetapkan.

Adapun permasalahan yang dapat menghambat kinerja Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan diantaranya :

1. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan serta sarana irigasi melebihi program/kegiatan yang telah ditetapkan
2. Alokasi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya tuntutan masyarakat akan pembangunan
3. Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kemampuannya/ profesionalismenya
4. Peran serta masyarakat masih sangat rendah terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan saluran irigasi sehingga mengakibatkan banyaknya sarana dan prasarana yang telah dibangun menjadi cepat rusak.
5. Faktor usia jalan dan intensitas maupun tonase kendaraan yang melebihi kekuatan kelas jalan, sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan jalan dan jaringan irigasi yang cukup banyak dan diperlukan dana yang cukup besar untuk memperbaikinya.



B. Saran

Guna mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul di masa yang akan datang, maka beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan, diantaranya :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mendukung dana pembangunan di Kabupaten Lamongan, baik itu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bantuan Keuangan Propinsi, maupun sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menetapkan skala prioritas program/kegiatan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat.
3. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparat pelaksana (sumber daya manusia Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan) agar lebih profesional, diantaranya dengan diikutkan dalam pelatihan, kursus, dan lain-lain
4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga dan merawat sarana dan prasarana infrastruktur yang telah dibangun, sehingga tidak mudah rusak.

Lamongan, Januari 2023

. KEPALA DINAS PU BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN

SUJARWO, S.T., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 1974093 200112 1 005

